

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia saat ini terus berkembang pesat, peningkatan kondisi bisnis diperkirakan terjadi diseluruh kategori lapangan usaha. Perusahaan harus mengikuti kondisi bisnis yang berkembang dengan cepat dan pesat terhadap perilaku bisnis. Perkembangan dunia bisnis yang semakin besar ini menuntut perusahaan untuk memiliki daya saing yang kuat serta sehat agar dapat bertahan. Perkembangan perusahaan mengakibatkan terjadinya dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertumbuhan perusahaan pun harus memperhatikan situasi internal demi terhindarnya dari dampak negatif. Sehingga bisa meminimalisir dari dampak negatif yang merugikan perusahaan. Kompleksitas perusahaan yang luas menimbulkan kurangnya pengawasan yang lebih oleh pemilik terhadap tindakan yang dilakukan manajemen.

Pengawasan yang kurang ketat oleh pemilik memicu pihak manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan tersebut dapat berbentuk berbagai cara antara lain: korupsi, penyelewengan, pencurian, penyalahgunaan aset perusahaan dan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan (*fraud*). baik yang dilakukan disektor publik maupun swasta, yang dapat merugikan perusahaan. Dalam

Proses yang dilakukan oleh perusahaan terdokumentasi sistematis untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, kondisi, sistem atau informasi sesuai dengan kriteria audit, serta mengkomunikasikan hasil proses kepada klien atau pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan yang utama harus ditetapkan oleh setiap auditor menyangkut banyaknya bukti pendukung yang memadai untuk dikumpulkan, agar auditor merasa yakin dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul. Banyaknya bukti yang harus dikumpulkan dalam suatu pemeriksaan tertentu merupakan proses pengambilan keputusan. Memperoleh bukti yang terlalu sedikit akan memperbesar kemungkinan kegagalan menemukan kesalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut.

Auditor internal diarahkan terutama untuk mendeteksi terjadinya tindakan kecurangan melalui ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, dan fungsi auditor internal adalah untuk mendeteksi tindakan kecurangan dan melindungi organisasi atau perusahaan dari tindakan kecurangan. Sedikitnya peran auditor internal dapat berakibat pada banyak pihak-pihak eksternal maupun internal yang dirugikan seperti kreditur, pemerintah, pemasok, masyarakat, karyawan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait secara langsung oleh perusahaan. Selain itu, kecurangan juga berdampak terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan jangka panjang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Auditor internal harus sigap dalam mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan karena hal ini sangat penting dalam perkembangan suatu perusahaan.

Adapun pengertian Audit internal menurut Mulyadi, adalah :

“auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosudur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah doipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.¹

Pembentukan audit internal dalam suatu organisasi atau perusahaan diharapkan dapat membantu kinerja organisasi, meningkatkan kinerja manajemen serta dapat menambah kualitas pelayanan perusahaan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dapat disebabkan oleh kurangnya peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut. Seperti contoh tindakan kecurangan yang terjadi pada PT.Duta Palma Nusantara Kuantan Singngi Riau seperti penyelewengan jabatan, misalnya seorang mandor yang bekerja sama dengan karyawan, karyawan tersebut tetap mengisi absensi kerjanya namun tidak bekerja seperti biasa dan mandor yang bertugas mengawasi karyawan tersebut memberikan izin kepada karyawan untuk melakukan hal itu dengan tujuan mandor tersebut mendapatkan keuntungan yaitu gaji satu hari yang diperoleh karyawan harus dibagi dua kepada mandor yang bertugas mengawasi kerja karyawan tersebut. Hal seperti ini sering terjadi di lingkungan perusahaan, karena kurangnya pengawasan audit internal dalam perusahaan tersebut.

¹ Mulyadi, **Auditing**, cetakan ke-1: Salemba Empat, Jakarta,2002, hal 29.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu peran dan tanggung jawab auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Untuk itu penulis mencoba untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENGARUH PERAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PT.DUTA PALMA NUSANTARA KUANTAN SINGINGI RIAU PADA TAHUN 2020**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran audit internal dalam pencegahan kecurangan pada PT.Duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau pada tahun 2020?
2. Bagaimana tanggung jawab audit internal dalam pencegahan kecurangan pada T.Duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau pada tahun 2020?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab audit internal secara simultan dalam pencegahan kecurangan pada PT.Duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran audit internal dalam pencegahan kecurangan pada PT.duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau pada tahun 2020
2. Untuk mengetahui tanggung jawab audit internal dalam pencegahan kecurangan pada PT.Duta Palma Nusantara Riau pada tahun 2020
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab audit internal secara simultan dalam pencegahan kecuranga pada Pt.Duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau pada tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan didalam penelitian ini:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab auditor internal terhadap pencegahan kecurangan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini menambah referensi yaitu mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal terhadap pencegahan kecurangan, dan hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi kepada mahasiswa/mahasiswi yang ingin mendalami atau ingin meneliti tentang audit internal dalam suatu perusahaan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai peran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

2.1.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:

1. Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawa hukum “);
2. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”);
3. Pasal 372 tentang penggelapan (definidi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);
4. Pasal 378 tentang perbuatan curang (defnisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”);
5. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan paillit;
6. Pasal 406 tentang menghancurkan barang atau merusakkan barang (definisi KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”);
7. Pasal 209,210,387,388,415,417,418,419,420,423,425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999).²

Disamping KUHP juga ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori *fraud*, seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbagai undang-undang perpajakan yang mengatur tindak pidana perpajakan, undang-undang tentang pencucian uang, undang-undang perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Juga dalam bahasa aslinya, *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum. Ada juga istilah lain yang sering kali digunakan untuk menggambarkan suatu jenis *fraud*, yakni kejahatan kerah putih atau white-collar crime.

Berikut unsur-unsur dapat terjadinya *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Korban *fraud* menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru
2. Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting.
3. Adanya kerugian atau keuntungan dalam jumlah material bagi perusahaan atau instansi pemerintahan.

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

² Theodorus M. Tuanakotta, **Akuntansi Forensik & Audit Investigatif**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 194

2.1.2 *Fraud Tree (Pohon Fraud)*

Secara skematis, *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan occupational *fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Occupational fraud tree* ini mempunyai 3 cabang utama, yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements*. Masing-masing beserta ranting dan anak rantingnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Corruption*

Istilah "*corruption*" disini serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-undangan kita. Istilah korupsi menurut UU No.31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi, dan bukan empat bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting-ranting: *conflicts of interest*, atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan didunia bisnis sekalipun. Bisnis yang mengandung benturan kepentingan sering disamakan dengan kegiatan sosia-keagamaan dan muncul dalam bentuk yayasan-yayasan.

Bribery atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik diindonesia.

illegal gratuities, adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam, kasus korupsi diindonesia

kita melihat hal ini dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat.

Economic extortion, adalah ancaman ini bisa merupakan pemerasan. Dalam hal ini *kickback*, sipembuat keputusan (atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan) dapat “mengancam” sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Indikasinya adalah sang rekanan “tidak terpakai” lagi meskipun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan pemenang.

2. *Assets Misappropriation*

Assets Misappropriation atau “pengambilan” aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. Cabang dan ranting yang menggambarkan *fraud* dari *asset misappropriation* sebagai berikut: (a) yang sering menjadi sasaran penjarahan adalah uang (baik dikas maupun dibank. Yang dibank, baik yang berupa giro, tabungan maupun deposito) *cash missappropriation* atau penjarahan kas yang dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: *Skimming*, dalam *skimming* uang di jarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk

keperusahaan. Cara ini terlihat dalam *fraud* yang dikenal para auditor, yakni *lapping*.

Larceny, kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan asset (*safeguarding of assets*). *Fraud disbursement*, pencurian ini melalui pengeluaran yang tidak sah. Pencurian seperti ini sebagai berikut: *billing schemes* adalah skema permainan (*schemes*) dengan menggunakan proses *billing* atau pembebanan tagihan sebagai sasarannya, *payroll schemes* adalah skema permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif. *Expense reimbursemen schemes*, adalah skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. *Check tamperin*, adalah skema permainan melalui pemalsuan cek. *Register Disbursement*, adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam *cash register*. (b) Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang (*inventory*). Umumnya daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi dari asset lainnya. Namun, dalam situasi tertentu persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sasaran pencurian.

3. *Fraudulent statements*

Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit (opinion audit). *Fraud* yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan, sangat menjadi perhatian auditor, masyarakat atau para

LSM/NGO, namun tidak menjadi perhatian akuntan *forensik*. Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan, *fraud* ini merupakan salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*). Cabang dari ranting ini ada dua, pertama menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/ revenue overstatements*), kedua menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/ revenue understatements*). Ranting kedua yang menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan, *fraud* ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan sering kali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun ekstern. Contoh: perusahaan minyak besar didunia yang mencantumkan cadangan minyaknya lebih besar secara signifikan dari keadaan yang sebenarnya apabila diukur dengan standar industrinya, atau perusahaan yang alat produksinya atau limbahnya membawa bencana bagi masyarakat, tetapi secara terbuka (misalhnya melalui iklan) mengklaim keadaan sebaliknya.

Manfaat *fraud tree*, *Fraud tree* dibuat ACFE sangat bermanfaat. *Fraud tree* memetakan *fraud* dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis *fraud* yang terjadi. Ada gejala-gejala “penyakit” *fraud* yang dalam auditing dikenal sebagai *red flags*. Dengan memahami gejala-

gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit *investigatif*, akuntan *forensik* dapat mendeteksi *fraud* tersebut.

2.1.3 *Fraud Triangle*

Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini lebih dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga *fraud*. Sudut pertama dari segitiga itu diberi judul *pressure* yang merupakan *perceived non shareable financial need*. Sudut keduanya, *perceived opportunity*. Sudut ketiganya, *rationalization*. Ketiga sudut ini akan dibahas yaitu antara lain:

1. *Pressure*

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang terpenting disini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya. Konsep ini dalam bahasa inggris disebut *perceived non-shareable financial need*. Tekanan yang memberikan motivasi untuk melakukan *fraud* antara lain: ketamakan atau keasyikan dengan kesuksesan, gaya hidup melebihi kemampuan, hutang pribadi yang tinggi, tagihan medis yang tinggi, ketidak mampuan memperoleh kredit, kebutuhan finansial yang tidak terduga, kerugian finansial pribadi, kebiasaan yang mahal seperipenggunaan obat alkohol dan perjudian, hubungan gelap seksual,

kebosanan, tantangan, tekanan istri atau suami atau keluarga, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti gaji yang rendah kegagalan memperoleh promosi, perlakuan tidak adil dan ketidakpuasan atas pekerjaan.

2. *Perceived Opportunity* (kesempatan)

Adaya *non-shareable financial problem* saja, tidaklah akan menyebabkan orang melakukan *fraud*. Ketiga unsur yang digambarkan dalam *fraud triangle* harus ada, untuk bisa terjadinya *fraud*. *Non-shareable financial problem* menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi, Pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini, *perceived opportunity*, meupakan sudut kedua dari *fraud triangle*.

3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Sudut ketiga dari *fraud triangle* ini adalah *rationalization* atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran adalah bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar sipelaku dapat mencerna prilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang di percaya. *Rasionalisasi* tindakan *fraud* umumnya disebabkan oleh :
persaan digaji terlalu redah, percaya dipekerjaan berlebihan, persaan bahwa semua orang melakukan hal yang sama, harga diri atau moral yang rendah, keinginan untuk balas dendam, percaya bahwa *fraud* merupakan

hutang dan akan dibayar kembali, kepercayaan bahwa tidak seorang pun yang dirugi, dan asumsi bahwa *fraud* hanya untuk sementara.

2.1.4 Mencegah *Fraud*

Para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Upaya mencegah *fraud*, adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern aktif

Merupakan bentuk pengendalian intern yang paling banyak diterapkan. Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang sering dipakai pada umumnya sudah dikenal dalam sistem akuntansi, meliputi:

- a. Tanda tangan, merupakan unsur penting dalam pengendalian intern aktif, yang sering dipergunakan. Tanda tangan juga merupakan sarana yang paling dipercaya. Ini merupakan sarana pengendalian intern aktif karena dokumen yang harus seharusnya ditandatangani tetapi belum ditandatangani, adalah tidak sah. Asumsinya tanpa tanda tangan apa yang mustinya dilaksanakan tidak dapat terlaksana. Pertimbangan lain, tanda tangan seseorang sangat khas atau unik, seperti sidik jarinya.
- b. Tanda tangan kaunter, pembubuhan lebih dari satu tandatangan dianggap lebih aman, khususnya bagi pihak ketiga atau pihak diluar perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Anggapannya adalah penandatanganan lainnya mengawasi rekannya. Sebenarnya,

dalam *fraud* memalsu lebih dari satu tandatangan tidak lebih sukar dari memalsukan satu tandatangan.

- c. *Password* dan PIN, sarana ini menjadi populer ketika manusia berinteraksi dengan komputer. Tanpa *password* atau PIN seseorang tidak bisa mengakses apa yang diinginkannya. Karena itu *password* atau PIN dianggap sarana dalam pengendalian intern aktif.
- d. Pemisahan tugas, menghindari seseorang dapat melaksanakan sendiri seluruh transaksi. Merupakan bagian pengendalian intern aktif karena secara teoritis, pelaku *fraud* yang bertindak seorang diri, tidak dapat melaksanakan *fraud* nya.
- e. Pengendalian asset secara fisik, pada dasarnya mengatur gerak gerik barang (masuk, keluar, dan penyimpanannya) memerlukan otorisasi. Disini justru titik lemahnya. Dokumen dan tanda tangan mudah dipalsukan.
- f. Pengendalian persediaan secara *real time*, ini adalah *perpetual inventory* yang mengikuti pergerakan persediaan secara *on time*. Dalam bentuknya yang canggih, persediaan diberi *bar code* atau bahkan ditanam dengan radio *chip* yang merekam keberadaannya. Keuntungannya adalah pencatatan menjadi akurat. Kelemahannya sistem otomatisasi juga mudah dimanipulasi.
- g. Pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik. Perlindungan melalui pembatasan akses terhadap harta berharga

sangat populer. Harga peralatan canggih yang mahal. Sering kali memberi rasa aman yang palsu.

- h. Pencocokan dokumen dan formulir yang sudah dicetak nomornya. Sarana ini juga sangat lazim digunakan dalam pengendalian intern aktif.

2. Pengendalian intern pasif

Tujuan pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif sama, yaitu mencegah terjadinya *fraud*. Dalam pengendalian intern aktif, dari permukaan kelihatan tidak ada pengamanan, namun ada peredam yang membuat pelanggar atau pelaku *fraud* akan jera. Peredam ini diumumkan secara luas, dan sistemnya memastikan hal ini. Ada dua perbedaan antara pengendalian internn aktif dan pengendalian intern pasif,yaitu: (a) dalam hal biaya. Pengendalian intern aktif jauh lebih mahal dari pengendalian intern pasif, (b) pengendalian intern aktif kasat mata atau dapat diduga dan dapat ditembus. Pengendalian intern pasif, dilain pihak tidak kasat mata dan tidak predictable (orang yang tertangkap tangan seolah-olah mendapat lotere terkutuk), dan karenanya tidak terelakkan. Dalam pengendalian pasif pernyataannya adalah seberapa nekadnya sicalon pelaku.

Beberapa bentuk lain pengendalian intern pasif meliputi:

- 1. Pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi (*customized controls*). Merupakan hasil dari berpikir positif, ketika pengendalian intern

aktif tidak memberikan pemecahan. Pengendalian intern pasif ini *customized controls* untuk masalah yang dihadapi.

2. Jejak audit (*audit trails*). Sistem yang dikomputerisasi sering menggunakan pengendalian intern pasif, karena ada jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan, yang ditinggalkan atau terekam dalam sistem. Ini akan menjadi pengendalian intern pasif yang efektif apabila jejak-jejak yang berupa perbuatan *fraud* dapat menunjuk kepada pelakunya.
3. Audit yang fokus (*focused audits*). Merupakan audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus, yang berdasarkan pengalaman rawan dan sering terjadi sasaran *fraud*.
4. Pengintaian atas kegiatan kunci (*surveillance of key activities*). Pengintaian bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara mulai dari kamera video yang merekam kegiatan disuatu ruangan sampai ruang kaca dengan cermin satu arah. Pengintaian juga dilakukan dalam jaringan komputer, dari waktu ke waktu untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor.
5. Pemindahan tugas (*rotation of key personal*). Rotasi karyawan kunci merupakan pengendalian intern pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan *fraud*. Seorang *supervisor* dibank harus ada dibank kalau ia menyelewengkan uang pelanggan yang mendapat bahwa itu transaksi bank yang sah.

2.1.5 Mendeteksi *Fraud*

Para praktisi harus tau apa yang mereka harapkan dari standar untuk pemeriksaan yang secara spesifik ditunjukkan untuk menemukan *fraud*. Sekurang-kurangnya para praktisi harus menyadari:

1. Mereka tidak bisa, karenanya tidak boleh, memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan *fraud*. Klien dapat membatasi upaya menemukan *fraud* diatas jumlah tertentu dengan pengertian bahwa potensi menemukan *fraud* ini tergantung kepada waktu dan keahlian yang digunakan, pada gilirannya ini tercermin dari *fee*.
2. Seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit. Diindonesia untuk pekerjaann KAP, standar ini adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
3. Jumlah *fee* bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien.
4. Praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap *proactive review* ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya *fraud*. Tentunya dengan tambahan *fee*.

2.1.6 Kejahatan Kerah Putih

Kejahatan kerah putih adalah terjemahan untuk istilah yang sangat dikenal dalam bahasa inggris, yakni *white-collar crime*. Kejahatan kerah putih terbatas pada kejahatan yang dilakukan dalam lingkup jabatan mereka dan karenanya tidak termasuk kejahatan pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, dan lain-lain yang

lazimnya tidak dalam lingkup kegiatan para pejabat berkerah putih. Kamus terbitan *the federal bureau of justice statistics (dictionary of criminal justice data terminology)* mendefinisikan *white-collar crime* sebagai:

“nonviolent crime for financial gain committed by means of deception by persons whose occupational status is entrepreneurial, professional or semi-professional and utilizing deception and committed by anyone having special technical and professional knowledge of business and government, irrespective of the person’s occupation.”

(“ kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang yang pekerjaannya adalah wiraswasta, profesional atau semi profesional dan yang memanfaatkan keahlian dan peluang yang diberikan oleh jabatannya; juga kejahatan tanpa kekerasan demi keuntungan keuangan yang dilakukan dengan penipuan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dengan pengetahuan profesional mengenai bisnis dan pemerintahan, meskipun ia tidak terkait dengan pekerjaannya.”)

2.2 Konsep Peran Auditor Internal

2.2.1 Pengertian Peran Auditor Internal

Menurut Asthon (1991) dalam Supadmi et al (2018), menyatakan peran penting audit internal dalam organisasi baik negeri maupun swasta adalah untuk meningkatkan kinerja operasi organisasi, sehingga mencapai tujuannya dengan berbagai pendekatan, disiplin, serta kejujuran. Sebagai konsultan (consultant), peran dari auditor internal adalah memberikan saran untuk perbaikan dan ikut

berpartisipasi secara aktif membantu manajemen melakukan berbagai tindakan perbaikan, sehingga lebih berperan sebagai mitra bagi pihak manajemen dan auditee. Lingkup dari pekerjaan auditor internal adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara ekonomis. Fokus utama dari auditor internal adalah melakukan konservasi terhadap sumberdaya organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi dan membantu pihak manajemen dalam mengelola organisasinya. Sebagai konsultan, auditor internal harus secara aktif bertindak sebagai fasilitator pihak auditee dalam rangka mendiskusikan the best possible choice untuk pemecahan masalah yang dihadapi auditee, dengan tetap mendasarkan pada prinsip efisien, efektif, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya perusahaan.

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Auditor internal

Auditor internal berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan perusahaan, sedangkan dalam struktur organisasi auditor internal lebih merupakan fungsi staf (fungsi penasehat) dan pada fungsi garis yang berkedudukan langsung dibawah direksi, sehingga auditor internal tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pejabat lain didalam organisasi di luar bawahannya sendiri.

Fungsi-fungsi auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mampu diawasi sendiri oleh top manajemen.
2. Fungsi identifikasi dan peminimalan risiko.

3. Fungsi validasi laporan ke manajer.
4. Fungsi support atau membantu manajemen dalam bidang-bidang teknis / khusus.
5. Fungsi membantu proses pengambilan keputusan.
6. Fungsi analisis masa depan - bukan hanya untuk masa lalu.
7. Fungsi membantu manajer untuk pengelolaan perusahaan.

2.2.3 Tujuan Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan audit intern merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit intern. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern, menurut Hiro Tugiman (2006:53) adalah sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit intern, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Menurut Hiro Tugiman (2006:53) audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi :

- penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
- Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa
- Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
- Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
- Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan
- Penulisan program audit
- Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan⁸.Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit

2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Hiro Tugiman (2006:59), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

- Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja
- Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi

- Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian
- Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi
- Dibuat kertas kerja pemeriksaan

3. Tahap penyampaian hasil audit

Laporan audit intern ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu ungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

4. Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

2.2.4 Peran Auditor Internal Untuk Mencegah *Fraud*

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut.

Peran Audit internal dalam mencegah *fraud* antara lain:

1. Mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program anti-*fraud* yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan berkala.
2. Memfasilitasi penilaian resiko *fraud* pada instansi, unit pelaksana, dan tingkatan operasional.
3. Menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti-*fraud* untuk mengidentifikasi resiko *fraud*.
4. Mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti-*fraud*.
5. Melaksanakan *fraud auditing*
6. Melaksanakan penugasan *investigasi* untuk membuktikan dugaan *fraud* atau penyalahgunaan lainnya.
7. Melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak *fraud* yang terjadi.
8. Dan peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan.

2.3 Konsep Tanggung Jawab Auditor Internal

2.3.1 Definisi Audit Internal

Aktivitas audit internal adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi, tanpa fungsi audit internal dewan direksi atau pimpinan unit tidak dapat memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi.

Berikut beberapa pengertian Internal Audit menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mulyadi (2017) :

pengertian Audit internal adalah “auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah doipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.³

2. Menurut Lawrence B.Sawyer,JD,CIA,PA, dan Mortimer A.

Dittenhofer,Ph.D.,CIA dan James H. Scheiner , Ph.D. (2005) :

Audit internal adalah “sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan ekstenal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif- semua dilakukan denga tujuan untuk dikonsultasikan dengan

³ Ibid, hal 3.

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif”.⁴

2.3.2 Sasaran Auditing Internal

Sasaran audit internal adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Dengan memberikan kepada mereka itu analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar yang obyektif mengenai kegiatan yang telah direview. Auditor internal berurusan dengan semua tahapan kegiatan usaha, dimana dia dapat memberikan jasanya kepada manajemen. Ini berada diluar lingkup akuntansi dan catatan keuangan , guna memahami benar-benar segala operasi yang menjadi bahan review. Pencapaian sasaran menyeluruh ini meliputi kegiatan seperti:

1. Mereview dan menilai kelayakan, kecukupan, dan penerapan pengendalian akuntansi, pengendalian keuangan, dan pengendalian operasi lainnya, dan meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.
2. Memastikan sampai dimana kebijakan, rencana, dan prosedur yang sudah di gariskan ditaati.
3. Memastikan sampai dimana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan di amankan dari segala macam kehilangan.
4. Memastikan keterandalan data manajemen yang dibuat didalam perusahaan.
5. Menilai mutu prestasi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan.

⁴ Lawrence B. Sawyer, et.al., **Audit Internal Sawyer**, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal 10.

6. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan operasi.

2.3.3 Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab auditing internal dalam perusahaan haruslah di tetapkan dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal itu untuk berurusan dengan kekayaan, dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang sedang direview. Auditor internal harus bebas untuk mereview dan menilai kebijakan, rencana, prosedur, dan catatan.

Tanggung jawab auditor internal haruslah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten dengan kode Etika Institute Of Internal Auditors.
2. Mengkoordinasi kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan.

2.3.4 Fungsi Audit Internal

Praktek auditor internal berbeda dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, tergantung pada besarnya perusahaan, tingkat perkembangan sistem, sumber dana keuangan, dan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan informasi yang dihasilkan. Namun, ada juga sasaran-sasaran audit tertentu yang harus di tetapkan dan harus senantiasa dikaji ulang agar fungsi audit internal itu bisa bekerja efek. Sasaran-sasaran audit ini bisa diklasifikasikan

sebagai: (a) sasaran pengendalian akuntansi, (b) sasaran pengendalian administratif.

Dalam mengaudit sasaran pengendalian akuntansi, para auditor internal harus menentukan kememadaian pengendalian akuntansi yang langsung memusatkan perhatian pada pencegahan atau penemuan pada kekeliruan dan penyelewengan yang material dalam pelaksanaan sistem akuntansi. Ada empat langkah yang bisa dilakukan auditor internal untuk diterapkan pada setiap kelompok transaksi dan aktivitya yang signifikan yaitu:

1. Mengidentifikasi jenis kekeliruan dan penyelewengan akuntansi yang mungkin terjadi.
2. Menetapkan prosedur yang harus mencegah atau menemukan kekeliruan dan penyelewengan semacam itu.
3. Menguji transaksi serta prosedur-prosedur untuk menentukan apakah prosedur-prosedur yang diperlukan sudah digariskan dan dipatuhi secara memuaskan.
4. Mengevaluasi semua jenis kekeliruan dan penyelewengan yang tidak dicakup oleh prosedur pengendalian internal yang ada. Ini akan membantu dalam menentukan pengaruhnya terhadap sifat, waktu, atau luasnya prosedur auditing lainnya yang mungkin di perlukan.

Dalam pendekatan ini, kedua langkah pertama dilakukan terutama dengan menggunakan daftar pertanyaan, daftar pengecekan, intruksi, atau materi yang setara telah digeneralisasi. Langkah 3 dan 4 dilakukan dengan mengkaji ulang

sistem dan melakukan pengujian ketaatan, diiringi dengan pertimbangan profesional. Masalah akuntansi dan pelaporan harus mematuhi prinsip akuntansi yang sudah lazim (GAAP).

Dengan menjalankan fungsinya, auditor internal tidak memikul tanggung jawab langsung dan juga tidak mempunyai wewenang atas kegiatan-kegiatan yang sedang diriview itu. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penilaian audit internal sama sekali tidak membebaskan orang lain dalam perusahaan itu dari tanggung jawabnya.

2.3.5 Tujuan Audit Internal

Secara umum tujuan audit internal adalah membantu manajemen menjalankan tugasnya yaitu dengan menyediakan informasi tentang kelayakan serta keefektifan dari pengendalian internal perusahaan dan kualitas pelaksanaan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran. Maka dapat dikatakan juga bahwa tujuan audit internal adalah memberikan bantuan atau jasa kepada manajemen perusahaan berkesinambungan mengenai temuan-temuan kesalahan (error) dan ketidakberesan (irregularities) dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar mengenai pengendalian dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2.3.6 Tanggung Jawab Auditor Internal

Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari

pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen.

Apabila auditor intern mencurigai adanya suatu tindakan kecurangan, maka hal tersebut harus segera diinformasikan kepada otoritas yang berwenang. Auditor intern dapat merekomendasikan apakah tindakan investigasi perlu dilakukan, setelah itu auditor harus menindak lanjuti untuk meyakini bahwa tanggung jawabnya telah terpenuhi.

Waspada terhadap peluang terjadinya kecurangan karena kelemahan pengendalian, auditor intern dapat melihat beberapa indikator terjadinya *fraud* seperti transaksi yang tidak diotorisasi, banyak kerusakan produk pengendalian diabaikan, pengecualian diabaikan, pengecualian harga yang tidak dapat dijelaskan. Jika indikator fraud telah dinilai positif maka dapat dilanjutkan dengan investigasi biasanya melibatkan multidisiplin dari dalam maupun luar organisasi dan dikoordinasikan dengan baik.

Tanggung jawab pemeriksaan intern dalam area pengendalian kecurangan terdapat pada prinsip akuntansi dapat diikhtisarkan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelaahan sistem. Untuk membantu menilai sejauh mana pencegahan dan penemuan kecurangan diberikan pertimbangan yang wajar bersama dengan tujuan operasi yang lain.
2. Berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecurangan dalam penelaahan aktivitas operasi yang dilakukan oleh personil organisasional termasuk penilaian yang konstruktif tentang kemampuan manajerial.

3. Membantu dan bekerja sama dengan personil organisasional dan pihak lain yang telah diberikan tanggung jawab berkaitan dengan penyelidikan dan kecurangan yang dicurigai.

Melaksanakan penugasan khusus yang berhubungan dengan kecurangan apabila diminta oleh anggota organisasi yang bertanggung jawab.

2.3.7 Kegiatan Auditor dalam Penyelesaian Audit

Kegiatan auditor dalam penyelesaian audit di bagi menjadi 2 kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian pekerjaan audit lapangan

Yang terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Meriview peristiwa-peristiwa kemudian, merupakan peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal penyelesaian audit dilapangan. Yang dibagi atas dua peristiwa yaitu: (a) peristiwa kemudian yang memerlukan jurnal penyesuaian terhadap laporan keuangan yang diaudit, dan (b) peristiwa kemudian yang tidak memerlukan jurnal penyesuaian namun memerlukan penjelasan di laporan keuangan yang diaudit.
- b. Melakukan tanya-jawab kepada pengacara/konsultan hukum klien, merupakan jenis perkara yang melibatkan klien dan bentuk tuntutan pihak lain terhadap klien dan taksiran nilai dan jumlah tuntutan ganti-rugi.

- c. Mengidentifikasi dan memeriksa transaksi hubungan istimewa, merupakan transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara khusus sehingga transaksi yang terjadi di luar transaksi pasar yang wajar.
 - d. Memperoleh surat pernyataan klien, merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur utama dan manajer keuangan untuk menegaskan pernyataan lisan manajemen kepada auditor, untuk bukti dokumentasi pernyataan manajemen dan untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap pernyataan manajemen secara lisan dan surat tersebut ditujukan kepada auditor.
 - e. Membuat review secara keseluruhan, merupakan review untuk menaksir kesimpulan yang dicapai dan menilai penyajian laporan keuangan secara keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan prosedur-prosedur audit tambahan jika diperlukan.
2. Menilai temuan-temuan secara keseluruhan (*Findings*)
- Yang terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ini:
- a. Membuat taksiran akhir terhadap materiality dan resiko audit, taksiran akhir materialitas yaitu taksiran terhadap material tidaknya kesalahan-kesalahan yang ditemukan dan yang tidak dikoreksi oleh klien.

- b. Merumuskan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Melengkapi review atas kertas kerja pemeriksaan (KKP)
- d. Mereview secara teknis terhadap laporan keuangan, meminta komentar dari akuntan yang lain untuk dinilai (yang satu level). Hasil kerja audit boleh direview oleh yang lain dengan catatan: mempunyai keahlian yang sama. Sebelum auditor menerbitkan laporan auditnya maka review secara teknis terhadap laporan keuangan dapat dilakukan oleh partner yang lain yang tidak terlibat dalam audit yang bersangkutan, juga melakukan prosedur analitis.
- e. Melakukan komunikasi dengan komite audit, komite audit adalah: bertanggung jawab untuk mengamati proses pelaporan keuangan. Oleh sebab itu laporan keuangan yang telah diaudit biasanya ditanda tangani oleh komite audit sehingga auditor wajib/ harus melakukan komunikasi dengan komite audit tentang laporan keuangan yang diaudit dan juga tentang antara lain: tanggung-jawab aditor, kebijakan-kebijakan akuntansi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melakukan audit dan saran-saran perbaikan untuk memperbaiki pengendalian intern klien.
- f. Menyiapkan management letter, management letter adalah suatu surat yang dibuat oleh auditor kepada manajemen yang

isinya tentang saran-saran perbaikan untuk memperbaiki keefesienan dan keefektifan operasi klien yang ditemukan auditor selama auditnya termasuk kelemahan pengendalian internnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penuli dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian pada tabel 2.1 sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ta hun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Sarah Trijayanti 2008	Pengaruh Peran dan Tanggung Jawab Auditor Intern terhadap Pencegahan Tindakan Kecurangan	Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa: Hipotesis penelitan yang menyatakan peran auditor intern berpengaruh terhadap pencegahan tindakan kecurangan dapat di terima yaitu sebesar 0,541 atau 54,1%. Sedangkan tanggung jawab auditor internal ditolak.
2	Maria Margaretha Karamoy 2019	Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (studi	Berdasarkan kesimpulan ini maka: pencegahan dan pendeteksian kecurangan terbukti dari hasil uji regresi sederhana diperoleh nilai $B > 0$ bernilai positif dan tingkat

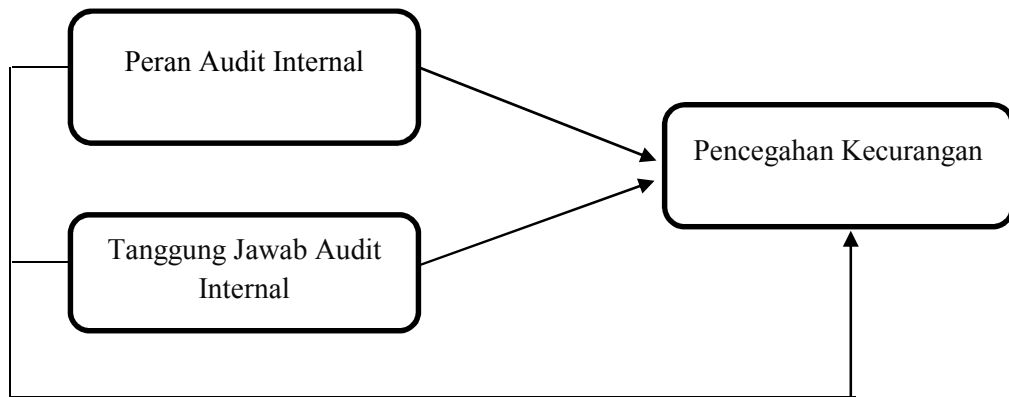
		kasus di PT Sumber Pangan Gisindo)	signifikansinya sebesar $0,000 < 0.05$ yang artinya H_0 ditolak.
3	Rina Wahyuni 2020	Peran Auditor Internal dalam Mengatasi Fraud Pada Pemerintah Makassar (studi kasus kantor balaikota makassar)	Bahwa : peran audit internal dalam pencegahan meliputi pada 3 peran yakni: mencegah kecurangan, mendeteksi kecurangan, dan melakukan investigasi kecurangan. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fraud dilakukan meliputi faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan terjadinya kecurangan.
4	Reyvisa Samsul 2018	Analisis Peran Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada PT. Haka Sentra Corporindo Makassar	Bahwa: auditor internal dalam mendeteksi kecurangan harus memiliki sikap independensi, perilaku jujur, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tingkat kecurangan yang terjadi dalam perusahaan sudah dapat terkendali hingga kecurangan juga dapat berkurang.
5	Theresa Festi T, Dr.Andreas,M M.Ak.CPA.C A, Riska Natariasari,SE. MM.Ak.CA 2014	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada perbankan di pekanbaru)	Bahwa: pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan diuji melalui Uji t. Dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 6,695 lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar 2,010. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan.
6	Emi Lestari Br.Barus	Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT.INDONESIA ALUMINIUM ASAHAN (PERSERO) kuala tanjung	Bahwa: secara parsial, variabel audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Variabel independen pada penelitian ini menjelaskan pencegahan kecurangan sebesar 56,7% sehingga masih ada variabel lain diluar penelitian ini yang dapat menjelaskan pencegahan

			kecurangan.
7	Aji ahmad fahrurroji	Pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan	Bahwa: hasil uji deskriptif yang menyatakan bahwa audit internal sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya karena sesuai dengan standar profesionalnya, berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan dengan pengaruh audit internal sebesar 38,3% dan sisanya 61,7% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diteliti.

2.5 Kerangka Teoritis

Kerangka merupakan bagian dari suatu bentuk sistem, sedangkan konsep merupakan acuan atau batasan teori yang ada. Jadi kerangka teoritis adalah unsur dasar pokok dalam suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah ke dalam definisi operasional.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, maka peneliti membuat kerangka konseptual seperti dibawah ini yang menunjukkan hubungan antara Peran dan Tanggung Jawab Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan, maka akan dirumuskan dengan kerangka teoritis sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Teoritis

2.5.1 Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang berfungsi mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian rekomendasi dan komentar yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. audit internal mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pengelolaan resiko dan sistem pengendalian intern (Suginam,2016). Peran dari auditor internal menjadi semakin penting karena audit internal bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Kwatingtyas, 2014). Menurut penelitian Petrasu (2014) disimpulkan bahwa auditor internal memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan

pendeteksian kecurangan. Semua entitas memerlukan audit internal untuk efisiensi bisnis dalam mengurangi biaya sambil memaksimalkan laba dan mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Audit internal perlu melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menghasilkan pengeluaran tetapi tidak memberikan nilai tambah di masa depan.

2.5.2 Tanggung Jawab Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam karakter audit internal, konsistensi dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAII), dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas. Penerapan standar audit internal karenanya akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat bagian audit internal melaksanakan tanggung jawabnya, kesesuaian dengan konsep-konsep yang dinyatakan oleh kualifikasi ini sangatlah penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah menggunakan cara-cara yang tepat sesuai dengan standar (Singleton, et al., 2006).

Singleton et al (2006) juga menyatakan bahwa tanggung jawab seorang auditor internal berhubungan dengan pendeteksian kecurangan. Auditor

bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan tindakan melawan hukum lainnya, memperbaiki keefektifan audit, yaitu perbaikan dalam pendeteksian salah saji material, mengkomunikasikan pada pemakai laporan keuangan, informasi yang lebih berguna tentang sifat dan hasil proses audit, termasuk peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis, dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada komite audit atau yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya.

Tanggung jawab auditor internal tidak hanya menunjukkan adanya kecurangan, akan tetapi auditor internal bertanggung jawab untuk membantu dalam mendeteksi kecurangan. Suatu kecurangan tersebut dapat dicegah dengan cara meningkatkan sistem pengendalian internal yang terdapat di perusahaan, karena pada dasarnya unsur yang menentukan terjadinya kecurangan adalah diri manusia dan sistem pengendalian internal yang ada. Picket (2005) mengatakan bahwa audit charter menetapkan peran yang disepakati dan posisi audit internal dalam sebuah organisasi dan ini didefinisikan dalam daftar istilah *The institute of Internal Auditors* (IIA) dengan istilah piagam audit internal. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang mendefinisikan aktivitas audit internal berupa tujuan, wewenang dan tanggung jawab. Piagam audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam organisasi : kewenangan atas akses terhadap catatan, personil dan sifat fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasan dan mendefinisikan ruang lingkup kegiatan audit internal. Setianto (2004) mengatakan bahwa audit charter dapat digunakan untuk memperoleh berbagai manfaat, antara lain sebagai bentuk pengakuan formasi atas fungsi audit internal:

mendokumentasikan ruang lingkup, kewajiban, wewenang dan profesionalisme fungsi audit internal: sebagai pembanding dengan standar professional untuk menilai kecukupan pekerjaan audit internal; sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan dan prosedur satuan audit internal; memberikan penjelasan mengenai misi audit internal kepada auditee; sebagai dasar bagi akuntan eksternal dalam menilai independensi dan pekerjaan audit internal; dan dapat menjadi dokumen pemasaran untuk meningkatkan Kerjasama dengan unit-unit lain dengan organisasi.

2.5.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka berpikir yang telah atau dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Peran Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

H₂: Tanggung Jawab Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

H₃: Peran dan Tanggung Jawab Audit Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Adapun pengertian penelitian kuantitatif menurut Jadongan Sijabat yaitu **“penelitian yang datanya dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik”**.⁵ Dan Objek dari penelitian ini adalah peran dan tanggung jawab auditor internal dalam mencegah kecurangan di PT. Duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian berjumlah 35 karyawan yang bekerja di PT.Duta Palma Nusantaran Kuantan Singingi Riau. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT.Duta Palma Nusantara Kuantan Singingi Riau yang berjumlah 25 karyawan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah *sampling purposive* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana eneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Sehingga metode sampel yang digunakan adalah sampel purposive dengan kriteria sebagai berikut:

- Petugas yang berkaitan dengan akuntansi dengan internal auditor
- Perusahaan memiliki laporan keuangan pada tahun 2020

⁵ Jadongan Sijabat, **Metode Penelitiain Akuntansi**, fakultas ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, hal 3

- Perusahaan memiliki laporan audit internal pada tahun 2020

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Terikat Pencegahan Kecurangan

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah pencegahan terhadap kecurangan yang dipengaruhi oleh peran dan tanggung jawab auditor internal sebagai variabel bebas (*independent variable*).

3.3.2 Variabel Bebas Peran Audit Internal

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Peran auditor internal (X_1), Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas pertama (X_1) adalah peran auditor internal yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yang menjadi variabel terikat (dependen variabel). Peran auditor internal yaitu memberikan informasi yang diperlukan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif dan berperan penting dalam hal pengelolaan perusahaan serta risiko-risiko terkait, termasuk juga risiko kecurangan.

3.3.3 Variabel Bebas Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas kedua (X_2) adalah tanggung jawab auditor internal yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yang menjadi variabel terikat (dependen variabel). Tanggung jawab auditor internal adalah memberikan layanan kepada

organisasi sesuai dengan standart profesionalnya yang berlaku serta mencegah atau mendeteksi kecurangan yang ada diperusahaan.

3.3.4 Defenisi Operasional

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Skala Ukur
1	Peran Audit Internal (X_1)	peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan dan mendeteksi <i>fraud</i> . Kemampuan mendeteksi <i>fraud</i> adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai <i>fraud</i> .	Likert
2	Tanggung Jawab Audit Internal (X_2)	Tanggung jawab audit internal adalah untuk membantu manajemen mencegah <i>fraud</i> dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen.	Likert
3	Pencegahan Kecurangan (Y)	Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.	Likert

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data sekunder

Adapun pengertian data sekunder menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo yaitu; **“sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.⁶ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai peran dan tanggung jawab internal auditor terhadap pencegahan kecurangan dari beberapa buku. Selain itu mengumpulkan data beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasi dalam jurnal.

2. Data Primer

Menurut Jadongan sijabat data primer (primary data) adalah **“sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”**⁷. Cara primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa kuesioner.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam melakukan penyusunan tulisan, metode

⁶ Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, **Metode Penelitian Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh: BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal 147

⁷ Jadongan Sijabat, **Metode Penelitiain Akuntansi**, fakultas ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, hal 85

pengumpulan data merupakan media yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan kuesioner.

M

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang supomo, yaitu: **“pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner”**.⁸

Peneliti memilih teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk melakukan penelitian terkait kebenaran informasi yang didapat pada saat melakukan kegiatan penelitian sekaligus peneliti ingin melihat pendapat responden mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal terhadap pencegahan kecurangan. Metode kuesioner digunakan untuk mendorong keakuratan hasil penelitian serta memberikan informasi tambahan yang berguna bagi peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Dan skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert yang merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala likert ini terdiri dari lima pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju (SS) hingga sangat tidak setuju (STS). Lima tersebut diantaranya adalah:

1. Sangat setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Cukup setuju (CS)

⁸ Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, **Metode Penelitian Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh: BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal 154

4. Tidak setuju (TS)
5. Sangat tidak setuju (STS)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Pengujian dan Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah “yang tidak berada” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Data dinyatakan valid jika *r*-hitung yang merupakan nilai dari *correct item-total correclation*> dari *r*-tabel pada signifikan 0,5 (5%)

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Reliabilitas suatu variable yang dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai *Conback's Alpha*> dari 0,60.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi dianggap sebagai uji prasyarat dimana uji prasyarat merupakan suatu bentuk uji pendahuluan atau syarat yang terlebih dahulu dipenuhi sebelum menggunakan suatu analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak dalam menganalisis pengaruh *return on asset*, *return on equity*, *earning per share*, *net profit margin*, *economic value added* terhadap harga saham. Persamaan yang digunakan harus memenuhi asumsi dasar yaitu data terdistribusi secara normal, bebas multikolonearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji grafik merupakan salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic nonparametric Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2016). Uji K-S dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika angka sig > taraf sig (α) 0,05 maka distribusi dapat dikatakan normal, sebaliknya.
2. Jika angka sig < taraf sig (α) 0,05 maka distribusi dapat dikatakan tida normal.

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara varibel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal yaitu variabel independent yang nilai korelasi antara sesama variabel sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolenrance}$). Nilai Tolerance tidak kurang dari 0.1 dan nilai variance inflation

factor yang tidak lebih dari 10 sehingga model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2016).

3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Untuk menguji koefisien ini penulis menggunakan data SPSS for windows. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai tabel dengan kriteria keputusan adalah :

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Peran Audit Internal, dan Tanggung Jawab Auditor Internal (variabel independe) mempunyai pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (variabel dependen).
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, Peran dan Tanggung Jawab Audit Internal (variabel independen) tidak mempunyai pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (variabel dependen).

3.6.3.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel-variabel yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independent ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016).